

**Peran Kelembagaan Lokal dalam Aktivitas Usaha Perikanan di Kelurahan Pundata Baji,
Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep**

**The Role of Local Institutions in Fisheries Business Activities in Pundata Baji Village,
Labakkang District, Pangkep Regency**

Didi Aryadi✉, Andi Adri Arief, Mardiana E. Fachry, M. Irham Ilyas, Alpiani, Faisal Amir

Program Studi Agrobisnis Perikanan Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan,
Universitas Hasanuddin

✉corresponding author: didiaryadi381@gmail.com

Abstrak

Kelembagaan lokal merupakan nilai - nilai, aturan, struktur, dan praktik-praktik yang ada dalam masyarakat lokal yang saling berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan peran kelembagaan lokal dalam aktivitas usaha perikanan di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober 2024-januari 2025. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis persepsi informan menggunakan skala likert dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Informan dari penelitian ini adalah masyarakat yang bermata pencaharian pada sektor perikanan yang meliputi nelayan tangkap, pembudidaya rumput laut dan petambak ikan. Selama penelitian berlangsung di lapangan, peneliti memperoleh informan sebanyak 26 orang dan dengan menggunakan pedoman penentuan informan tersebut maka total informan utama yang diambil untuk acuan pemberian informasi ialah sebanyak 19 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kelembagaan lokal masyarakat berupa *punggawa sawi*, *sipakatongeng*, *nakasa*, *pappalele*, dan *mabbulo sibatang* pada aktivitas usaha perikanan memainkan peran penting dalam keberlangsungan usaha perikanan. Kelembagaan lokal berperan sebagai wadah koordinasi, mekanisme bagi hasil dan peran ekonomi, pengelolaan konflik, kolaborasi dan solidaritas serta berperan dalam keberlanjutan ekosistem.

Kata Kunci: Kelembagaan lokal, aturan, aktivitas usaha perikanan.

Abstract

Local institutions are the values, rules, structures, and practices that exist within local communities and are interrelated with the activities carried out by a community. This study aims to determine the form and role of local institutions in fishing activities in Pundata Baji Village, Labakkang District, Pangkep Regency. This study was conducted from October 2024 to January 2025. This study used qualitative descriptive analysis and informant perception analysis using a Likert scale with data collection through interviews, observation, documentation, and literature study. The informants for this study were people whose livelihoods were in the fisheries sector, including fishermen, seaweed farmers, and fish farmers. During the field research, the researcher obtained 26 informants, and using the guidelines for determining informants, a total of 19 main informants were selected as references for providing information. The results of the study show that the existence of local community institutions such as *punggawa sawi*, *sipakatongeng*, *nakasa*, *pappalele*, and *mabbulo sibatang* in fishing activities plays an important role in the sustainability of the fishing industry. Local institutions act as a forum for coordination, a mechanism for profit sharing and economic roles, conflict management, collaboration and solidarity, and play a role in ecosystem sustainability.

Keywords: Local institutions, rules, fisheries business activities.

Pendahuluan

Daerah pesisir dan laut Sulawesi Selatan terhampar sepanjang 1.979,97 km garis pantai dengan perkiraan luas laut tidak kurang dari 48.000 km², yang meliputi wilayah laut yaitu Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone, serta wilayah pulau- pulau kecil dan wilayah Kepulauan

Spermonde dan wilayah Kepulauan Takabonerate. Sumber daya yang berada di dalamnya cukup beragam, meliputi sumber daya hayati seperti berbagai jenis ikan, krustasea, moluska, karang, alga, mangrove dan sumber daya non hayati yakni pasir putih, tambang, mineral dan lain- lain. Salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan potensi pemanfaatan sumber daya perikanan yang besar ialah Kabupaten Pangkep. Pemanfaatan sumber daya tersebut didukung dengan luas wilayah 898,29.km² dan luas laut 11.464,44 km² (4 mil garis pantai) dengan total 112 pulau. (Mosriula Mosriula, 2019). Kelurahan Pundata Baji yang terletak di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep bersebrangan langsung dengan laut yang termasuk kedalam Kelurahan wilayah pesisir dan memiliki garis pantai sehingga banyak masyarakat yang berada pada wilayah tersebut menggantungkan hidupnya pada sumber daya perikanan. Masyarakat Kelurahan Pundata Baji mayoritasnya sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya.

Berdasarkan kondisi sumberdaya tersebut macam aktivitas yang dilakukan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber daya ialah berupa pekerjaan menangkap ikan di laut (nelayan), Pekerjaan memelihara ikan di empang atau di tambak (petani tambak), hingga pekerjaan dalam mengangkut dan membuat kapal serta alat tangkap (Arief, 2023). Seperti dengan pekerjaan yang ada pada masyarakat pesisir Kelurahan Pundata Baji, selain nelayan tangkap banyak warga yang berprofesi sebagai pembudidaya rumput laut, dan petambak ikan dan udang pada tambak. Dengan memperhatikan pontensi dan permasalahan yang berkembang secara kompleks dalam kehidupan masyarakat pesisir membuktikan bahwa dinamika tersebut memerlukan pemberdayaan yang difasilitasi kelembagaan secara formal maupun non-formal sebagai *rule of the game* (aturan main). Pemberdayaan sendiri ialah kemampuan kelompok yang lemah dan rentan untuk dapat memperoleh dan menguasai bentuk keterampilan pada tiga aspek. Ketiga aspek tersebut yakni: pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap sumber daya produktif yang dapat meningkatkan pendapatan, dan partisipasi dalam proses pembangunan melalui aturan yang berlaku (Ariski & Ratnasari, 2022).

Masyarakat pesisir sekarang bergantung pada timbal balik antara ekonomi kapitalistik dengan hubungan sosial dan kekerabatan (kearifan lokal yang humanis). Tindakan ini erat kaitannya dengan sistem nilai budaya dan sikap yang menjadi faktor pengaruh pemikiran, sikap, dan tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta ketika mereka membuat keputusan penting lainnya. Hal tersebut merupakan kumpulan konsep dan ide abstrak yang tumbuh dalam pikiran mereka dan terwadahi dalam kelembagaan masyarakat lokal. Kelembagaan yang menjadi sistem dan norma-norma ini memberikan masyarakat kekuatan untuk melakukan kontrol sosial, yaitu sistem yang mengawasi tingkah laku anggotanya (Daris Lukman et al., 2022).

Meskipun berbagai bentuk kelembagaan lokal telah berkembang di masyarakat pesisir, pemahaman mengenai efektivitas dan perannya dalam pengelolaan sumber daya perikanan masih memerlukan pendalaman konseptual. Menurut Ostrom (1990), kelembagaan merupakan seperangkat aturan formal maupun informal yang mengatur bagaimana individu bertindak, berinteraksi, dan mengambil keputusan dalam mengelola sumber daya bersama. Sementara itu,

North (1991) menekankan bahwa kelembagaan berfungsi sebagai “aturan main” yang membentuk insentif, membatasi perilaku oportunistik, serta menciptakan stabilitas dalam aktivitas ekonomi. Kedua teori ini menegaskan bahwa efektivitas pemanfaatan sumber daya perikanan tidak hanya bergantung pada keberadaan sumber daya itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana struktur kelembagaan mampu mengatur akses, hak kelola, distribusi manfaat, dan mekanisme penyelesaian konflik. Namun, kajian empiris mengenai bagaimana kelembagaan lokal di Kelurahan Pundata Baji bekerja dalam praktiknya—terutama dalam mengatur aktivitas nelayan, pembudidaya, dan petambak masih terbatas. Gap penelitian ini menjadi penting mengingat perkembangan teknologi dan perubahan sosial ekonomi di wilayah tersebut berpotensi menggeser norma-norma lokal dan memengaruhi efektivitas aturan kelembagaan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana peran kelembagaan lokal dalam mengelola sumber daya perikanan di Pundata Baji, sejauh mana kelembagaan tersebut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, serta bagaimana kontribusinya terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoretis sekaligus memberikan dasar bagi perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan berbasis kelembagaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Ditinjau dari aspek kecenderungan proses operasionalnya, kelembagaan lokal terbentuk atas bentuk primer dan sekunder. Kecenderungan secara primer, kelembagaan tersebut memberikan power kepada individu atau masyarakat melalui pembagunan material sedangkan kecenderungan secara sekunder ialah melalui pemberian stimulus atau dorongan sesuai pilihannya dengan cara dialog (Bado Basri & Zulkifli, 2020). Kelembagaan perikanan sendiri ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi sektor perikanan (Arief, 2023). Pengelolaan yang berujung pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut telah dimanfaatkan melalui regulasi atau aturan kelembagaan lokal masyarakat Pundata Baji.

Fenomena peran kelembagaan dalam mengelola sumber daya perikanan dengan tujuan pemanfaatan yang berefek pada kesejahteraan menjadi topik pada penelitian ini. Walaupun Kelurahan Pundata Baji telah mengalami persebaran teknologi dan pengetahuan yang sudah terbilang maju, namun pengelolaan sumber daya melalui kelembagaan lokal masih dijalankan karena kelembagaan lokal yang ada pada masyarakat bisa saja memberikan kontribusi berupa perencanaan, pengambilan keputusan hingga pelaksanaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2024 – Januari 2025 yang bertempat di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan, Kelurahan Pundata Baji adalah salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang bermata pencaharian dalam sektor perikanan yang dapat dibuktikan dengan terdapatnya Kampung Nelayan dan Dermaga di Wilayah Pesisir tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dimana pada pendekatan ini berdasarkan

realitas yang ada dengan memperhatikan proses kejadian dengan tujuan untuk memahami lebih mendalam situasi yang diteliti sehingga diperoleh data deskriptif dan gambaran empiris yang menjadi bukti-bukti (Abdussamad Zuchri, 2021). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau sampling bertujuan, yang merupakan teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Pengukuran penelitian ini dirancang sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran kelembagaan lokal dalam aktivitas usaha perikanan. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha perikanan melalui kelembagaan lokal di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.

Analisis Data

Data penelitian yang telah diperoleh di Lapangan akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis persepsi informan menggunakan skala likert yang digunakan sebagai data pendukung. Skala likert ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan peran kelembagaan. Kedua analisis tersebut digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana usaha perikanan yang ada pada masyarakat di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep yang berdampak pada aktivitas usaha perikanan melalui kelembagaan lokal. Analisis kualitatif yang menekankan pada realita atau kondisi aslinya sebelumnya dikumpulkan pada catatan hasil pengumpumpulan data di Lapangan yang pada selanjutnya data kemudian klasifikasikan sehingga data yang tidak sesuai dengan masalah penelitian tidak akan digunakan untuk dilakukan analisis. Adapun penentuan skor tiap indikator penilaian dalam skala likert menurut (Sugiyono, 2019) ialah sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Setuju

4 = Sangat Setuju

Indikator penilaian menggunakan asumsi dasar interval kelas dan rentang kelas yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Nilai tertinggi} &= \text{Skor tertinggi} \times \text{Jumlah sampel} \\ &= 4 \times 19 = 76 \\ \text{Nilai terendah} &= \text{Skor terendah} \times \text{Jumlah sampel} \\ &= 1 \times 19 = 19 \\ \text{Interval kelas} &= \frac{\text{Angka Tertinggi} - \text{Angka Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} \\ &= \frac{76-19}{4} \\ &= 14,25\end{aligned}$$

Dari nilai tersebut, maka dapat dibuat kategori penilaian akhir sebagai berikut:

Optimal = 61,75 – 76

Cukup Optimal = 47,5 – 61,75

Kurang Optimal = 33,25– 47,5

Tidak Optimal = <33,25

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Kelembagaan Lokal dalam Aktifitas Usaha Perikanan

Tabel 1. Bentuk Kelembagaan Lokal dalam Aktivitas Usaha Perikanan

No	Aktifitas Usaha Perikanan	Bentuk Kelembagaan Lokal	Keterangan
1.	Nelayan Tangkap	<i>Punggawa Sawi</i> <i>Sipakatongeng</i> <i>Nakasa</i>	Hubungan Kerja (juragan-pekerja) Kepercayaan tidak tertulis Pantangan Melaut
2.	Pembudidaya Rumput Laut	<i>Pappalele</i> <i>Mabbulo sibatang</i>	Mitra Kerja (Distributor-Pembudidaya) Lembaga Musyawarah
3.	Petambak Ikan	<i>Punggawa Sawi</i> <i>Sipakatongeng</i>	Hubungan Kerja (juragan-pekerja) Kepercayaan tidak tertulis

Peran Kelembagaan Lokal dalam Aktifitas Usaha Perikanan

Koordinasi dan Pengorganisasian

Aktivitas Koordinasi dalam usaha perikanan ini berkaitan dengan bagaimana aktivitas yang sudah direncanakan dapat berjalan selaras tanpa adanya hambatan. Dan pengorganisasian dalam aktivitas usaha ini merupakan langkah awal untuk membangun sistem kerja yang terstruktur agar tugas dan peran dapat dikelola secara efektif. Seperti pada tabel persepsi informan berikut tentang bagaimana koordinasi dalam suatu kelompok aktivitas usaha dengan perspektif kelembagaan lokal:

Tabel 2. Persepsi Informan tentang Koordinasi pada Aktivitas Usaha Perikanan dalam Perspektif Kelembagaan Lokal

No	Koordinasi	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Persentase (%)	BxF	Hasil
1.	Sangat Setuju	4	3	15,78	12	
2.	Setuju	3	9	47,36	27	
3.	Tidak Setuju	2	4	21,05	8	
4.	Sangat Tidak Setuju	1	3	15,78	3	
	Jumlah		19	100	50	Cukup Optimal

Berdasarkan tabel diatas persepsi informan tentang koordinasi berada pada kategori cukup optimal, yang dimana sebagian besar informan menjawab “setuju” jika kelembagaan lokal memberikan ruang antar setiap anggota untuk saling berkoordinasi tentang hal yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Secara keseluruhan aktivitas koordinasi dan pengorganisasian dalam hal

saling berkaitan, dimana koorndinasi merupakan perencanaan dan pengorganisasian merupakan tahapan pelaksanaan.

Mekanisme Bagi Hasil dan Peran Ekonomi

Kelembagaan lokal menetapkan sistem bagi hasil yang adil dan disepakati bersama. Dalam kelompok nelayan tangkap dan petambak ikan, mekanisme ini melibatkan pembagian hasil tangkapan antara *punggawa* dan *sawi* dengan prinsip *sipakatongeng* atau saling percaya tanpa adanya hitam diatas putih. Pada kelompok pembudidaya rumput laut kelembagaan lokal *pappalele*, sistem bagi hasil diterapkan dengan menilai seberapa besar betuk kontribusi yang mereka berikan dalam kelompok usaha yang dijalankan. Pembagian hasil antar setiap anggota juga memang didasarkan oleh aturan dan kesepakatan bersama sebelumnya. Seperti pada tabel persepsi informan tentang aturan dan kesepakatan bersama dalam suatu kelompok usaha dalam perspektif kelembagaan lokal:

Tabel 3. Persepsi Informan tentang Aturan dan Kesepakatan Bersama pada Aktivitas Usaha Perikanan dalam Perspektif Kelembagaan Lokal

No	Aturan dan Kesepakatan Bersama	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Persentase (%)	BxF	Hasil
1.	Sangat Setuju	4	13	68,42	52	
2.	Setuju	3	4	21,05	12	
3.	Tidak Setuju	2	2	10,52	4	
4.	Sangat Tidak Setuju	1	0			
	Jumlah		19	100	68	Optimal

Persepsi sebagian besar informan menjawab “sangat setuju” jika kelembagaan lokal memberikan peranan sebagai aturan dan kesepakatan bersama dalam aktivitas usaha sehingga nilai berada pada kategori optimal. Dengan eksistensi kelembagaan lokal yang ada pada masyarakat ini juga terbilang strategis, karena aturan berupa kelembagaan yang dijalankan memanfaatkan kondisi lingkungan yang sesuai dan memberikan manfaat ekonomi.

Pengelolaan Konflik

Sebagai sistem lokal, kelembagaan lokal memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan mufakat. Ini berlaku untuk semua kelompok usaha perikanan, baik dalam menyelesaikan perselisihan terkait hasil usaha maupun dalam mengatasi perbedaan pendapat diantara anggota kelompok. Jadi pada hakikatnya seorang patron atau juragan dalam kelompok usaha harus mendengarkan dan memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anggota pekerjanya. Seperti pada tabel persepsi informan tentang pengelolaan konflik dalam suatu kelompok usaha dalam perspektif kelembagaan lokal.

Tabel 4. Persepsi Informan tentang Pengelolaan Konflik pada Aktivitas Usaha Perikanan dalam Perspektif Kelembagaan Lokal

No	Pengelolaan Konflik	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Persentase (%)	BxF	Hasil
1.	Sangat Setuju	4	10	52,63	40	
2.	Setuju	3	5	26,31	15	
3.	Tidak Setuju	2	3	15,78	6	
4.	Sangat Tidak Setuju	1	1	5,26	1	
	Jumlah		19	100	62	Optimal

Mayoritas informan memberikan jawaban “sangat setuju” terhadap peran kelembagaan dalam pengelolaan konflik sehingga dapat dibuktikan bahwa kelembagaan lokal dengan peran pengelolaan konflik berada pada kategori cukup optimal.

Kolaborasi dan Solidaritas

Kelembagaan lokal membangun solidaritas diantara anggota kelompok usaha perikanan melalui kegiatan produksi. Ini termasuk perbaikan alat tangkap, proses pengikatan bibit pada budidaya rumput laut secara berkelompok dan pengelolaan saluran tambak serta pengendalian pengendalian hama secara kolektif. Solidaritas ini memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan efisiensi kerja dalam semua jenis kelompok usaha perikanan. Seperti pada tabel persepsi informan tentang kolaborasi dan solidaritas dalam suatu kelompok usaha dalam perspektif kelembagaan lokal.

Tabel 5. Persepsi Informan tentang Kolaborasi dan Solidaritas pada Aktivitas Usaha Perikanan dalam Perspektif Kelembagaan Lokal

No	Kolaborasi dan Solidaritas	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Persentase (%)	BxF	Hasil
1.	Sangat Setuju	4	13	68,42	52	
2.	Setuju	3	5	26,31	15	
3.	Tidak Setuju	2	1	5,26	2	
4.	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0	
	Jumlah		19	100	69	Optimal

Persepsi informan terhadap peran kelembagaan dalam membangun kolaborasi dan solidaritas antar anggota usaha berada dalam kategori tinggi. Mayoritas informan memberikan jawaban “sangat setuju” tentang adanya kolaborasi dan solidaritas dalam aktivitas usaha dengan sistem kelembagaan lokal.

Keberlanjutan Ekosistem

Keberlanjutan ekosistem atau manfaat yang dapat digunakan kembali sebagai media pemanfaatan pencarian ekonomi bagi aktivitas kelompok usaha perikanan masyarakat pesisir

berasal dari pengelolaan yang mendukung. Salah satu wujud keberlanjutan adalah pelestarian habitat perairan. Adapun bentuk keberlanjutan ekosistem yang di rasakan oleh kelompok nelayan tangkap ialah keberadaan ikan di wilayah tangkapan yang masih dapat ditemui. ini menjadi dampak yang dirasakan kelompok nelayan dalam menjalankan produktivitasnya dalam melaut. Seperti pada tabel persepsi informan tentang keberlanjutan ekosistem dalam suatu kelompok usaha dalam perspektif kelembagaan lokal.

Tabel 6. Persepsi Informan tentang Keberlanjutan Ekosistem pada Aktivitas Usaha Perikanan dalam Perspektif Kelembagaan Lokal

No	Keberlanjutan Ekosistem	Bobot (B)	Frekuensi (F)	Persentase (%)	BxF	Hasil
1.	Sangat Setuju	4	11	57,89	44	
2.	Setuju	3	7	36,84	21	
3.	Tidak Setuju	2	1	5,26	2	
4.	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0	
	Jumlah		19	100	67	Optimal

Persepsi informan terhadap peran kelembagaan dalam menciptakan keberlanjutan ekosistem berada dalam kategori optimal. Mayoritas informan memberikan jawaban “sangat setuju” dan “setuju” tentang adanya dampak keberlanjutan ekosistem dalam aktivitas usaha dengan sistem kelembagaan lokal. Bagi kelompok pembudidaya rumput laut dan kelompok petambak ikan dengan kehadiran kelembagaan lokal keberlanjutan ekosistem yang dapat dirasakan ialah keseimbangan ekosistem akibat dari proses produksi yang praktiknya secara turun temurun tanpa menggunakan bahan dan alat yang berbahaya. keberlanjutan ekosistem memberikan manfaat besar dalam menjaga keseimbangan alam. Salah satu manfaat utama adalah terjaganya kualitas air, yang menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan budidaya.

Simpulan

Bentuk kelembagaan lokal masyarakat yang berupa aturan main dalam aktivitas usaha perikanan meliputi kelembagaan lokal *punggawa sawi*, *sipakatongeng* dan *nakasa* pada kelompok kerja nelayan tangkap pada pembudidaya rumput laut bentuk kelembagaan lokal yang diterapkan ialah *pappalele* dan *mabbulo sibatang* serta pada petambak bentuk kelembagaan lokal yang diterapkan ialah *punggawa sawi* dan *sipakatongeng*. Kelembagaan lokal tersebut pada dasarnya mengatur bagaimana sistem pembagian tugas, pembagian hasil dan mekanisme pengelolaan dalam memanfaatkan potensi perikanan. Peran kelembagaan lokal dalam aktivitas usaha perikanan ialah sebagai wadah koordinasi dan pengorganisasian, mekanisme bagi hasil dan peran ekonomi, pengelolaan konflik, kolaborasi dan solidaritas dan keberlanjutan ekosistem.

Daftar Pustaka

- Abdussamad Zuchri. (2021). *Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif (1)* (Rapanna Patta, Ed.). CV. Syakir Media Press.
- Arief, A. A. (2023). *Kelembagaan Perikanan*. Deepublish.
- Ariski, Y., & Ratnasari, W. P. (2022). Peran Kelembagaan Lokal dalam Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 10–22. <https://doi.org/10.37064/jpm.V10i1.9921>
- Bado Basri, & Zulkifli. (2020). *Buku Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir*. Penerbit Desanta Muliavisitama.
- Daris Lukman, Massiseng ANP, & Rochmady R. (2022). Peran Kelembagaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Wilayah Pesisir Kabupaten Maros. 15(2), 527–532. <https://doi.org/10.29239/J.Agrikan.15.2.527-532>
- Mosriula Mosriula. (2019). *Analysis Of Land Suitability, Carrying Capacity, And Development Strategies for Seaweed Cultivation in Labakkang District, Pangkep Regency, Indonesia*. <https://www.sangia.org/>
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Sogiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.